

ABSTRAK

Korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), kompleksitas dari modus operandi tindak pidana korupsi menyebabkan penindakan terhadap tindak pidana korupsi bukan merupakan sesuatu yang sederhana. Penindakan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara khusus dan didasari kewenangan yang besar untuk memberantas pelakunya. Polri selaku alat Negara penegak hukum, memiliki tanggung jawab dalam memberantas korupsi yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga tesis saya beri judul “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati“.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a. Bagaimana tindakan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Polres Pati, b. Hambatan apa yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Pati, dan c. Apa solusi terhadap hambatan yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Pati.

Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini dengan pendekatan yuridis sosiologis empiris, yakni meneliti azas-azas hukum terkait hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek, disamping itu juga dengan pendekatan deskriptif analitis yakni menggambarkan penyelidikan dan penyidikan Polri terhadap tindak pidana korupsi, serta pendekatan konseptual yang mengkaji pandangan para ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Permasalahan dianalisis dengan Teori Efektifitas Hukum dan Teori Hukum Progresif.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan : a. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Pati berdasarkan hukum positif, yaitu Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001, b. Hambatan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi saat ini diantaranya terkait kebijakan internal Kejaksaan Negeri Pati yang hanya mau menerima Berkas Perkara Korupsi dari Penyidik dengan perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPK RI, yaitu sejak dikeluarkannya SEMA RI Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016, yang intinya menerangkan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK, c. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut Penyidik sejak awal penyelidikan langsung koordinasi dengan BPK RI, karena syarat permintaan perhitungan kerugian keuangan Negara pada BPK RI status perkara harus sudah penyidikan, selain itu Penyidik melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dengan menyampaikan argumentasi yuridis yang dapat digunakan untuk mengesampingkan SEMA tersebut.

Kata Kunci : Penyelidikan dan Penyidikan, Polri, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Corruption that occurred in Indonesia is very concern, Corruption is not only done civil servants, but also involve employers, the private sector , state official, law enforcers and the people's representatives who sit in the DPR and DPRD. Corruption is an extra ordinary crime (crime extra ordinary) and to inforcement not an easy matter, son I needed that with the extraordinary supporty and commitment of all the Indonesian people , state officials and professionalism of law inforcemnt which must also be supported with the completion of the devive ;aws related to the eradication op curruption, especially police investigators, so give me thesis title **“The Investigation of Police to Corruption in Criminal Follow Jurisdiction Polres Pati“**.

This study aims t determine : a). The process of investigation of the follow Corruption Criminal Law in the region Polda Jateng at this time . b). The process of investigation and of the Follow Corruption Criminal Law in the area at the time Polda Jateng at the Next time or the ideal of law .

Research method in the writing of this thesis with the juridical towards approach normative empirical, that is researching related legal principlea regulation relations of one wityh the other regulation as well as its connection with the application in practice. And also with the discriptive approach analytical that is discribing the Investigation of Pilice to Corruption in Criminal Follow, as well as the conceptual approach that studied the view of experts who were linked with the subject of the discussed problem.This problem is analized with Law Efectivity Theory and Progresive Law Theory.

Research, provide conclutions : a) That in the process of investigation in the Follow Corruption Criminal Poalda Jateng the rule of law based on the positive at this time, among other event Criminal Law (KUHAP), Law No. 2 of Year 2002, is Kepolisian Negara Republik Indonesia, and Law No. 31 of Year 1999 is Follow Corruption and Criminal Law and No. 20 of Year 2001 is Changes in the Law No. 31 of year 1999. b). That in the process of investigation to Follow Cfriminal Police Corruption for the future or ideal , required the Politice Will of the government and relate institutions, it is visible the complexity of the bureaucracy in the license review office to have to wait a wriiten approval from the President . Because it is a must / is absolutely necessary for the officer / person as a Head of Regional or Deputy Regional , as written in article 36 of law No. 32 Of Year 2004 on Local Government, so that aobstruct gthe way process of investigation.

Keywords : The Investigation, Police, Follow-Corruption Criminal.